

**ANALISIS DAMPAK KOMERSIALISASI PENDIDIKAN & STRATEGI
INKLUSIVITAS PADA SEKOLAH DASAR DI WILAYAH URBAN**

Fiqra Amaliah ZR¹, Suardi²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Makassar

¹fiqraamaliah7@gmail.com, ²suardi@unismuh.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of educational commercialization and inclusivity strategies in the implementation of elementary education in urban areas. The issue examined arises from the increasing tendency to position education as a commodity, which potentially limits access to and equity in education for students from diverse socio-economic backgrounds. This research employed a qualitative descriptive approach conducted at SD Negeri 18 Kalosi and SD Negeri 103 Kalosi. Data were collected through interviews with school principals, teachers, and parents, observations of student admission processes and learning activities, analysis of school documents, and group discussions with students. The findings indicate that, in general, schools have made efforts to implement principles of equity and inclusivity through student admission policies aligned with government regulations and relatively non-discriminatory learning practices. However, educational commercialization is still evident through differences in school fees, admission selection processes, and limited access to certain activities that require additional financial support, which may hinder the participation of students from underprivileged families. Teachers play a crucial role in reducing these disparities through differentiated instruction, group work, and additional learning support. This study concludes that although inclusivity efforts have been implemented, educational commercialization remains a challenge in achieving equitable and dignified elementary education, thus requiring stronger policy reinforcement and more systematic structural support.

Keywords: Educational Commercialization, Educational Inclusivity, Social Justice.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak komersialisasi pendidikan serta strategi inklusivitas pada penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar di wilayah urban. Permasalahan yang dikaji berangkat dari kecenderungan pendidikan yang semakin diposisikan sebagai komoditas, sehingga berpotensi membatasi akses dan keadilan pendidikan bagi peserta didik dari latar belakang sosial-ekonomi yang beragam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di SD Negeri 18 Kalosi dan SD Negeri 103 Kalosi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa, observasi proses penerimaan peserta didik dan pembelajaran, analisis dokumen sekolah, serta diskusi kelompok dengan siswa. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa secara umum sekolah telah berupaya menerapkan prinsip keadilan dan inklusivitas melalui kebijakan penerimaan siswa yang mengacu pada regulasi pemerintah serta pelaksanaan pembelajaran yang relatif non-diskriminatif. Namun demikian, praktik komersialisasi pendidikan masih terlihat melalui perbedaan biaya pendidikan, seleksi masuk, dan keterbatasan akses terhadap kegiatan tertentu yang memerlukan dukungan finansial tambahan, sehingga berpotensi menghambat partisipasi siswa dari keluarga prasejahtera. Guru berperan penting dalam mengurangi kesenjangan tersebut melalui penerapan pembelajaran diferensiatif, kerja kelompok, dan pendampingan belajar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun upaya inklusivitas telah dilakukan, komersialisasi pendidikan masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pendidikan dasar yang adil dan bermartabat, sehingga diperlukan penguatan kebijakan dan dukungan struktural yang lebih sistematis.

Kata Kunci: Komersialisasi Pendidikan, Inklusivitas Pendidikan, Keadilan Sosial.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu negara. Di Indonesia, pendidikan telah mengalami berbagai perubahan signifikan sejak era kemerdekaan hingga saat ini. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan adanya gejala komersialisasi pendidikan, di mana pendidikan semakin dipandang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Komersialisasi pendidikan membawa implikasi yang kompleks, baik dari segi aksesibilitas, kualitas, hingga dampaknya terhadap keadilan sosial (Hasanah et al., 2024). Pengertian komersialisasi pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBI), komersialisasi diartikan sebagai perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Komersialisasi pendidikan dimaknai sebagai sebuah manajemen pendidikan yang menempatkan lembaga pendidikan sebuah institusi komersial (Zainuddin & Rozali, 2022).

Kutipan dari "The Oxford Handbook of Philosophy of Education", kurikulum pendidikan sering kali dirancang untuk melanggengkan ideologi dominan dan menjaga kepentingan kelompok tertentu yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya ekonomi. Dalam konteks Indonesia, hal ini terlihat dari berkembangnya institusi pendidikan swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan

premium, tetapi dengan biaya yang sangat tinggi. Sekolah-sekolah dan universitas swasta sering kali menjadi pilihan utama bagi kelompok masyarakat yang mampu, sementara sekolah negeri yang seharusnya menjadi tumpuan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, mengalami keterbatasan anggaran dan sumber daya. Akibatnya dari fenomena tersebut, kelompok sosial-ekonomi bawah semakin terpinggirkan dari akses terhadap pendidikan berkualitas. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung masuk ke sekolah-sekolah dengan fasilitas dan kualitas yang lebih rendah, sementara anak-anak dari keluarga kaya dapat menikmati fasilitas pendidikan yang lebih baik, seperti sekolah internasional atau perguruan tinggi dengan program kelas dunia yang berbiaya tinggi. Ini memperkuat ketimpangan sosial dan reproduksi struktur kelas di masyarakat (Hasanah et al., 2024).

Pendidikan inklusif merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pendidikan nasional indonesia, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Prinsip dasar

pendidikan inklusif adalah bahwa setiap anak, tanpa memandang keadaan mental maupun fisiknya memiliki hak untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhannya (Alhaddad, 2020). Sebagai bagian dari komitmen global terhadap pendidikan yang adil dan merata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 dengan tegas menekankan pentingnya penerapan pendidikan inklusif di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Kompleksitas implementasi pendidikan inklusif di indonesia tidak dapat dilepaskan dari karakteristik geografis dan demografis yang heterogen, mencakup disparitas aksesibilitas infrastruktur pendidikan, variasi kompetensi tenaga pendidik, serta diversitas konteks sosial-budaya yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap konsep inklusi. Penelitian empiris mengindikasikan bahwa mayoritas satuan pendidikan penyelenggaraan program inklusif menghadapi tantangan multidimensional dalam merancang

kurikulum yang responsif terhadap keberagaman kebutuhan siswa (Riyadi et al., 2025).

Penyelenggaraan pendidikan dasar di wilayah urban saat ini menghadapi tantangan serius terkait munculnya praktik komersialisasi pendidikan yang berpotensi memengaruhi prinsip keadilan dan pemerataan akses belajar. Perbedaan biaya pendidikan, mekanisme seleksi peserta didik, serta keterjangkauan terhadap fasilitas dan kegiatan sekolah menimbulkan kesenjangan partisipasi belajar, khususnya bagi peserta didik dari keluarga prasejahtera. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek akses masuk ke sekolah, tetapi juga berimplikasi pada pengalaman belajar, relasi sosial antarsiswa, serta peluang pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Di sisi lain, tuntutan mutu dan daya saing sekolah sering kali mendorong lembaga pendidikan untuk mengedepankan aspek manajerial dan pembiayaan, yang apabila tidak diimbangi dengan prinsip inklusivitas dapat memperlebar ketimpangan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pendidikan yang tidak semata-mata berorientasi pada

efisiensi pengelolaan sekolah, tetapi juga menjamin perlindungan hak pendidikan dan keberpihakan pada keberagaman latar belakang peserta didik. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak komersialisasi pendidikan terhadap akses dan proses pembelajaran di sekolah dasar wilayah urban, serta mengkaji strategi inklusivitas yang diterapkan sekolah dalam upaya mewujudkan pendidikan dasar yang adil, setara, dan bermartabat bagi seluruh peserta didik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena komersialisasi pendidikan serta strategi inklusivitas dalam penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar di wilayah urban. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah realitas sosial pendidikan secara kontekstual, khususnya terkait pengalaman, pandangan, dan praktik yang berlangsung di lingkungan sekolah. Data penelitian dikumpulkan melalui

wawancara mendalam dengan kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa, observasi terhadap proses penerimaan peserta didik dan pelaksanaan pembelajaran, analisis dokumen sekolah, serta diskusi kelompok dengan siswa. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara tematik melalui proses reduksi, pengelompokan, dan penafsiran data guna mengidentifikasi pola, makna, serta keterkaitan antar temuan penelitian. Pendekatan analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai dinamika akses pendidikan, praktik pembelajaran, dan upaya sekolah dalam mewujudkan prinsip keadilan dan inklusivitas.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa, diperoleh temuan bahwa sekolah telah berupaya menerapkan prinsip keadilan dan inklusivitas dalam akses serta proses pembelajaran, meskipun masih menghadapi keterbatasan terkait perbedaan sosial-ekonomi siswa. Kebijakan penerimaan peserta didik dilaksanakan sesuai ketentuan pemerintah dengan memperhatikan

zonasi, prestasi, afirmasi, sementara biaya pendidikan diupayakan tidak menjadi penghambat utama meskipun kegiatan tertentu masih memerlukan dukungan finansial tambahan. Di tingkat kelas, guru menyadari bahwa latar belakang sosial-ekonomi memengaruhi kesiapan dan kecepatan belajar siswa, sehingga diterapkan strategi pembelajaran diferensiatif, kerja kelompok, dan pendampingan tambahan untuk mencegah ketertinggalan belajar. Orang tua siswa memiliki pandangan yang beragam, namun secara umum menilai bahwa sekolah cukup adil, komunikatif, dan terbuka, serta diharapkan terus memperkuat dukungan belajar dan penanaman nilai empati sosial bagi seluruh peserta didik.

Berikut adalah tabel perbandingan antara kedua tipe sekolah dasar.

Tabel 1 Perbandingan Hasil Observasi

Aspek yang Diamati	SD Negeri 18 Kalosi	SD Negeri 103 Kalosi
Proses penerimaan siswa terbuka untuk	Terbuka secara administratif, namun dibatasi	Terbuka untuk semua kalangan tanpa seleksi akademik ketat

semua kalangan	seleksi dan biaya	
Terdapat biaya tinggi/seleksi eksklusif	Biaya relatif tinggi dengan seleksi masuk	Biaya terjangkau dan tanpa seleksi eksklusif
Keterlibatan siswa dari berbagai latar ekonomi	Didominasi ekonomi menengah ke atas	Beragam, dari ekonomi rendah hingga menengah
Pelaksanaan pembelajaran bersifat kolaboratif, non-diskriminatif	Kolaboratif dan non-diskriminatif	Adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan siswa
Ada program beasiswa/subsidi/pendidikan berbasis komunitas	Tersedia beasiswa dan subsidi terbatas	Mengandalkan bantuan pendidikan dari pemerintah

Selanjutnya berdasarkan hasil analisis dokumen pada sekolah dasar yang menerapkan biaya pendidikan relatif tinggi dan seleksi ketat, ditemukan bahwa sekolah memiliki dokumen kebijakan penerimaan siswa baru yang disusun secara resmi dan digunakan sebagai acuan dalam proses seleksi peserta didik. Dokumen tersebut memuat ketentuan umum, persyaratan administrasi, serta

mekanisme penerimaan siswa. Namun, dokumen lain seperti data rinci biaya pendidikan dan program beasiswa, regulasi internal mengenai inklusivitas, serta laporan tertulis terkait aktivitas pembelajaran kolaboratif dan inklusif belum tersedia atau tidak dapat diakses secara terbuka. Kondisi ini menunjukkan bahwa sekolah telah menjalankan berbagai praktik pendidikan dalam pelaksanaan sehari-hari, tetapi belum seluruhnya didukung oleh dokumentasi tertulis yang lengkap dan sistematis.

Sedangkan berdasarkan diskusi kelompok siswa, sebagian besar siswa menyampaikan bahwa mereka merasa senang dan bangga ketika diterima di sekolah tersebut. Proses awal masuk sekolah dirasakan cukup menegangkan, terutama karena adanya seleksi dan persyaratan tertentu, namun setelah mengikuti kegiatan belajar, siswa mulai merasa terbiasa dengan lingkungan sekolah. Sebagian siswa menyatakan bahwa mereka diperlakukan dengan baik oleh guru dan teman-teman di kelas, meskipun pada awalnya ada rasa canggung dalam beradaptasi. Secara umum, siswa merasa diterima sebagai bagian dari warga sekolah. Terkait

perlakuan adil, mayoritas siswa berpendapat bahwa guru berusaha memperlakukan semua siswa secara sama dalam kegiatan pembelajaran. Namun, dalam diskusi juga terungkap bahwa terdapat beberapa kegiatan tertentu, seperti kegiatan tambahan atau perlengkapan sekolah, yang tidak selalu dapat diikuti oleh semua siswa karena alasan biaya. Beberapa siswa menyadari bahwa ada teman yang terkadang tidak ikut kegiatan tertentu atau membawa perlengkapan yang berbeda, meskipun hal tersebut jarang dibicarakan secara terbuka di kelas. Siswa juga menyampaikan harapan agar semua anak memiliki kesempatan belajar yang sama, misalnya dengan adanya bantuan biaya untuk kegiatan sekolah, peminjaman perlengkapan belajar, serta dukungan tambahan bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Menurut siswa, guru-guru sudah cukup membantu ketika mereka mengalami kesulitan, baik dengan memberikan penjelasan ulang, bimbingan tambahan, maupun motivasi. Meskipun demikian, siswa berharap dukungan tersebut dapat diberikan secara lebih merata, terutama bagi teman-teman yang membutuhkan bantuan lebih banyak.

Berdasarkan beberapa hasil temuan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar menunjukkan dinamika antara pemenuhan hak pendidikan dan tantangan keadilan sosial. Temuan menunjukkan bahwa secara normatif sekolah telah membuka akses pendidikan melalui kebijakan penerimaan siswa dan proses pembelajaran yang relatif non-diskriminatif. Hal ini sejalan dengan teori hak pendidikan yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh layanan pendidikan yang layak tanpa pembedaan. Namun dalam praktiknya, keberadaan biaya pendidikan yang tinggi dan seleksi masuk yang ketat pada sekolah tertentu berimplikasi pada terbatasnya akses bagi anak dari keluarga prasejahtera, sehingga berpotensi mengurangi prinsip keadilan sosial dalam pendidikan. Di sisi lain, sekolah yang lebih inklusif memperlihatkan upaya nyata dalam menerima keberagaman peserta didik, termasuk peserta didik dengan kebutuhan belajar tertentu melalui pembelajaran adaptif dan dukungan guru di kelas. Praktik ini mencerminkan prinsip

sekolah inklusif yang menempatkan keberagaman sebagai bagian dari proses pendidikan. Meski demikian, keterbatasan dokumentasi kebijakan dan dukungan struktural menunjukkan bahwa praktik inklusivitas masih banyak bergantung pada inisiatif individu guru dan budaya sekolah bukan pada sistem yang terlembagakan. Kondisi ini juga mencerminkan gejala komersialisasi pendidikan di mana aspek pembiayaan cenderung lebih terstruktur dibandingkan kebijakan inklusivitas, sehingga menegaskan perlunya keseimbangan antara efisiensi pengelolaan sekolah dan komitmen terhadap keadilan sosial serta pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh peserta didik.

Melalui pelaksanaan penelitian ini, penulis memperoleh pemahaman bahwa pendidikan dasar merupakan hak setiap anak yang seharusnya dapat diakses secara adil tanpa dibatasi oleh latar belakang sosial dan ekonomi. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa praktik komersialisasi pendidikan, seperti penerapan biaya tinggi dan seleksi ketat masih menjadi tantangan nyata dalam mewujudkan keadilan pendidikan. Di sisi lain, praktik

inklusivitas yang diterapkan di beberapa sekolah memperlihatkan bahwa penerimaan terhadap keberagaman peserta didik dan dukungan guru memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan adil. Refleksi ini menegaskan bahwa pemenuhan hak pendidikan tidak hanya berkaitan dengan akses masuk ke sekolah, tetapi juga dengan pengalaman belajar yang setara dan manusiawi bagi seluruh peserta didik.

Berdasarkan refleksi tersebut, diperlukan upaya konkret untuk memperkuat inklusi dan keadilan di sekolah dasar. Sekolah diharapkan dapat meningkatkan transparansi kebijakan penerimaan dan pembiayaan, serta memperluas program bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga prasejahtera. Selain itu, penguatan kebijakan inklusivitas secara tertulis, pelatihan guru terkait pembelajaran diferensiasi, serta penyediaan dukungan belajar yang merata perlu terus dikembangkan. Dengan langkah-langkah tersebut, sekolah dapat meminimalkan praktik diskriminatif dan memastikan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang

setara sesuai dengan haknya sebagai peserta didik.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa praktik penyelenggaraan pendidikan dasar di wilayah urban menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan prinsip keadilan dan inklusivitas, namun masih dihadapkan pada tantangan struktural khususnya terkait komersialisasi pendidikan. Sekolah pada dasarnya telah membuka akses pendidikan dan menerapkan pembelajaran yang relatif non-diskriminatif, tetapi penerapan biaya pendidikan yang tinggi serta seleksi masuk tertentu masih berpotensi membatasi akses bagi peserta didik dari keluarga prasejahtera. Di sisi lain, praktik pembelajaran adaptif, dukungan guru, serta iklim kelas yang menghargai keberagaman menjadi kelebihan yang patut diapresiasi, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya didukung oleh kebijakan dan dokumentasi yang sistematis.

Implikasinya, pengembangan model pendidikan dasar yang adil dan bermartabat perlu diarahkan pada keseimbangan antara pengelolaan

sekolah yang efektif dan komitmen kuat terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh anak. Penguatan kebijakan inklusivitas, transparansi pembiayaan, serta perluasan dukungan bagi siswa yang membutuhkan harus menjadi bagian dari sistem, bukan sekadar inisiatif individual. Dengan demikian, sekolah dasar dapat berfungsi tidak hanya sebagai lembaga akademik, tetapi juga sebagai ruang pembentukan nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan martabat peserta didik secara menyeluruh

DAFTAR PUSTAKA

- Alhaddad, M. R. (2020). konsep pendidikan multikulturan dan pendidikan inklusif. *Raudhah Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 5(1), 21–30.
<https://doi.org/10.48094/raudhah.v5i1.57>
- Hasanah, R., Iqbal, M., & Noor, I. (2024). *Komersialisasi Pendidikan Dan Implikasinya Terhadap Dakwah Di Era Teknologi*. 8(2), 33–50.
- Riyadi, S., Munip, A., Junaidi, A., Buaja, T., Shaddiq, S., & Andriani, N. (2025). TRANSFORMASI PENDIDIKAN LUAR BIASA DI ERA DIGITAL: INKLUSI DAN TEKNOLOGI DI TAHUN 2025. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 6(1), 1211–1222.

Zainuddin, & Rozali, M. (2022).
KOMERSIALISASI PENDIDIKAN
DI INDONESIA. *Jurnal Al-Kaffah*,
10(2), 225–246.